

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

YOSHINTA ENDAH WAHYUNINGSIH

B 200 110 200

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi yang berjudul:
**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”**

Yang disusun oleh :

YOSHINTA ENDAH WAHYUNINGSIH

B 200 110 200

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut memenuhi syarat
untuk diterima.

Surakarta, 14 Januari 2016

Pembimbing,



(Drs. Suyatmin, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M.Si)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. untuk menguji Dana Perimbangan berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini yaitu 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki data realisasi *Anggaran* Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2011 – 2013.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang berupa uji analisis regresi linier berganda, uji statistik T, uji statistik F, Uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah*

ABSTRACT

The purpose of this study to examine the original income (PAD) effect on the financial performance of the government. to test the effect on the Balance Fund of the government's financial performance.

The population in this study are 35 districts / cities in Central Java province that already has the data of the Regional Budget (APBD) in the period 2011-2013.

This research uses descriptive statistical analysis, the classical assumption in the form of normality test, multicollinearity, autocorrelation test, heteroscedasticity test and test hypotheses in the form of test multiple linear regression analysis, statistical tests T, F statistical test, test the coefficient of determination (R^2).

The results of this study indicate that local revenues had no effect on the financial performance, while the fund balance adversely affect the financial performance as evidenced by the significant value of < 0.05 .

Keywords: PAD, the Balancing Fund Financial Performance Government

PENDAHULUAN

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Perubahan tidak terjadi di pusat tetapi juga di daerah. Setelah era reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Akibatnya dari adanya otonomi daerah dituntutnya pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan. Mahmudi (2010:142) analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Florida:2007) dalam Alfarisi (2015).

Penelitian ini mengembangkan penelitian Julitawati, dkk (2012) yang dahulu meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian tersebut mengambil populasi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 18 kabupaten dan 5 kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (Yuwono 2005:107 dalam Julitawati 2012). Salah satu bentuk pendapatan daerah adalah PAD. Pada era otonomi daerah dimana sistem pemerintah masih berbentuk sentralisasi ternyata membawa dampak kurang baik pada pembangunan daerah. Hal ini terlihat dengan terhambatnya kebebasan daerah dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dampak lainnya yang merugikan adalah tingginya tingkat ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah pusat. Hal ini disebabkan besarnya andil dan intervensi yang diberikan oleh Pemerintah pusat terhadap jalannya pemerintah di tiap daerah.

Selanjutnya menurut pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Intensifikasi

Yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.

b. Ekstensifikasi

Yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek

seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.

Menurut pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintahan RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan iuran yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air
2. Pajak Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel Dan Restoran
 - b. Pajak Reklame
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Penggalan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - f. Pajak Parkir

b. Hasil Retribusi Daerah,

Menurut UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- c. Retribusi Pelayanan Pasar
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan
 - c. Retribusi Terminal
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang sah
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Darise 2009:48 dalam Pelealu 2013). Proporsi Pendapatan Asli Daerah maksimum hanya sebesar 10% dari total Pendapatan Daerah, kontribusi terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. (Halim, 2004 dalam Subowo 2010). Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- c. Jasa giro.
- d. Bunga deposito.
- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. pendapatan denda pajak.
- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- j. Pendapatan dari pengembalian.
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- l. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah : “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. (Djaenuri, 2012 dalam Alfarisi).

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil atau disebut juga dana bagian daerah merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Djaenuri, 2012:100). Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas.

1. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

2. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

3. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

b. Dana alokasi umum

menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-undang (pasal 161).

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DAK adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

2. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Fahmi, 2012:2 dalam Indrawan, 2013).

(Mahmudi 2010:142 dalam Mokodompit, dkk, 2014) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan terdiri dari :

1. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keuangan Daerah

3. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+Provinsi}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) dalam Adhiantoko (2013) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti ditunjukkan berikut ini:

Julitawati, dkk (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Dalam penelitian ini data penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda yaitu menggunakan pooled data mulai dari tahun 2009 sampai

dengan 2011. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Cherry Dhia Whenny (2012) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kot di provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, menguji hipotesis penelitian, dan menunjukkan hubungan antar variabel. Metode penelitian kuantitatif bersumber dari sesuatu yang bersifat abstrak, difokuskan dengan teori, kemudian dirumuskan hipotesis untuk diuji sehingga menuju pada kejadian-kejadian yang konkrit.

METODE ANALISA DATA

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian rewgresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi.

2. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2012:127). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan peneliti adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah.

3. Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2011:97) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebutkan signifikan secara statistik apabila nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa yang terletak antara $5^{\circ} 40'$ dan $8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan antara $108^{\circ} 30'$ dan $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur (termasuk Kepulauan Karimun Jawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Kepulauan Karimun Jawa). Luas wilayah Jawa Tengah tahun 2006 tercatat sebesar 3.254.412 hektar. Batas wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Provinsi DIY dan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yaitu berupa statistik deskriptif. Statistik deskriptif meliputi rata-rata (mean), minimum, maksimal serta standar deviasi yang bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang menjadi sampel penelitian (Ghozali, 2011). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 4.2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 Pendapatan Asli Daerah	94	60155.00	1129077.00	147788.9894	155705.92266
X2 Dana Perimbangan	94	308553.00	1384770.00	816532.4468	229228.73054
Y Kinerja Keuangan	94	92.59	114.24	103.6829	4.88596
Valid N (listwise)	94				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran)

- Dari tabel IV.2 diketahui bahwa variabel Kinerja Keuangan (KK) memiliki nilai minimum 92.59, nilai maksimum 114.24 dengan nilai rata – rata 103.6829, dan nilai deviasi standar 4.88596.
- Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum 60155.00, nilai maksimum 1129077.00 dengan nilai rata – rata 147788.9894, dan deviasi standar 155705.92266. Variabel Dana Perimbangan (DP), memiliki nilai minimum 308553.00, nilai maksimum 1384770.00 dengan nilai rata – rata 816532.4468, dan deviasi standar 229228.73054.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian parsial antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah yang disajikan dalam tabel 4.7 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan $0,871 > \alpha 0,05$. Maka, hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan pengujian parsial antara variabel komite audit terhadap kinerja keuangan pemerintah yang disajikan dalam Tabel 4.7 diketahui bahwa Dana Perimbangan memiliki signifikan $0,024 < \alpha 0,05$. Maka, hipotesis kedua (H^2) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar -38.187 maka dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah periode 2011 – 2013, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.163 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.368 dan nilai signifikan statistik t untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,871. Nilai signifikan $0,871 > \alpha$ 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Dengan demikian, H_1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
2. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.275 lebih besar dari t_{tabel} sebesar -2.368 dan nilai signifikan statistik t untuk variabel Dana Perimbangan sebesar 0,025. Nilai signifikan $0,025 < \alpha$ 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Dengan demikian, H_2 menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yaitu tidak hanya tahun 2011-2013, sehingga dimungkinkan hasilnya akan lebih baik lagi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variabel-variabel independen (selain PAD dan Dana Perimbangan) yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran daerah, yang kemungkinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.
3. Bagi peneliti mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Alfarisi, Salman. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ebit, Darwanis, Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1. Nomer 1.
- Harry, David, Inggriani. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*. Jurnal EMBA. Volume 2. Nomer 3.
- Hartono, Halleina Rejeki Putri. 2013. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Hidayat, Rahmad. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Kalalo, Nadya Pretti, Dkk. 2014. *Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado*. Jurnal EMBA. Volume 2. Nomer 1.
- Mokodompit, Sandy Paramitha. 2014. *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mobagu*. Jurnal EMBA. Volume 2. Nomer 2.
- Mutahara, Rizqi. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi, Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. Jurnal EMBA. Volume 1. Nomer 4.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

- Republik Indonesia. 2003. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 *Tentang Retribusi Daerah*.
- Rukmana, Vidi Wan. 2013. *Pengaruh pajak daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kepulauan Riau*. Jurnal akuntansi fakultas ekonomi universitas maritim raja ali haji tanjungpinang.
- Setyaningsih, Tri. 2009. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wenny, Cherrya Dhia.2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal ilmiah STIE MDP. Volume 2. Nomer 1.